



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI SAID
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 764896

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.870.250.000

1. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 45.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/108 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/240 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
5. Tanah Seluas 9.796 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 705.000.000
6. Bangunan Seluas 18 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Bangunan Seluas 17 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Bangunan Seluas 17 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 85.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000



2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
10.500.000

3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 190.777.800

F. HARTA LAINNYA

Rp. 304.000.000

Sub Total

Rp. 3.450.027.800

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.450.027.800

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.